

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengemukakan teori-teori, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi umum yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Pelaksanaan *Good Government Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Government Governance*

Good Government Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia. Salah satu lembaga tersebut yaitu *United Nations Development Program* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*” (1997) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergi dan konstruktif diantar negara, sektor swasta, dan masyarakat (Dwiyanto, 2008:82).

Adapun definisi lain yang diungkapkan oleh lembaga dan beberapa pendapat dari para ahli. Definisi pertama dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 200 adalah sebagai berikut:

“*Good Governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.”

Kemudian definisi dari Mardiasmo (2009:18) yaitu:

“*Good Governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Lalu definisi lain dari Rochman (2009:276) yaitu:

“*Good Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif.”

Selanjutnya definisi dari Ulum dan Sofyani (2016:34) yaitu:

“*Good Governance* meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi, dan sosial. *Good Governance* juga sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administratif guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan

mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan diantara mereka.

2.1.1.2 Tujuan *Good Government Governance*

Good Government Governance lebih menekankan pada proses, sistem, prosedur, dan peraturan, baik formal maupun informasi, yang menata suatu organisasi untuk taat terhadap peraturan tersebut. *Good Governance* lebih diarahkan sebagai paduan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemakaian sumber daya organisasi sejalan dengan tujuan organisasi dan memberikan keuntungan yang berarti.

Tujuan dari diterapkannya *Good Government Governance* dalam pemerintahan menurut Kurniawan (2005:16) adalah:

“Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.”

Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *Good Governance* adalah:

1. “Birokrasi yang bersih
2. Birokrasi yang efisien
3. Birokrasi yang transparan
4. Birokrasi yang melayani masyarakat
5. Birokrasi yang akuntabel.”

Tujuan lain dari *Good Government Governance* dari Jubaedah (2007) yaitu:

“Agar instansi dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, kegiatan yang transparan dan terjaganya keseimbangan antara upaya pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan sosial-ekonomi instansi itu sendiri.”

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan berbagai tujuan dari *Good Governance*. Menurut peneliti, inti dari diberlakukannya *Good Governance* dalam pemerintahan agar dapat mewujudkan penyelenggaraan yang bersih, bertanggung jawab, efektif dan efisien, transparan, serta akuntabel .

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip *Good Government Governance*

Inti pembahasan dari *Good Government Governance* terletak pada pemahaman atas prinsip-prinsip *Good Government Governance* itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab bisa berjalan apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, memiliki interaksi yang setara. Interaksi dapat terjadi ketika prinsip-prinsip telah diterapkan dan dipahami dengan baik.

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam *Good Government Governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. “Profesionalitas
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Pelayanan Prima
5. Demokrasi dan Partisipasi
6. Efisiensi dan Efektivitas
7. Supremasi Hukum.”

Berikut penjelasan prinsip-prinsip di atas:

1. Profesionalitas

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

2. Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Meningkatkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. Pelayanan Prima

Penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

5. Demokrasi dan Partisipasi

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses dan pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak.

6. Efisiensi dan Efektivitas

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

7. Supremasi Hukum

Dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Organization for Economic Corporation and Development (2004)

menyebutkan ada empat unsur penting dalam *Good Government Governance*, yaitu:

1. “Keadilan
2. Transparasi
3. Akuntabilitas
4. Tanggung jawab.”

Karakteristik *Good Government Governance* yang seharusnya ada dalam sektor publik adalah penciptaan transparasi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (ekonomis, efisiensi, dan efektif). (Mardiasmo, 2009:18)

Prinsip-prinsip *Good Government Governance* selanjutnya menurut Agoes (2013:103) adalah sebagai berikut:

1. “Transparasi
2. Kemandirian
3. Akuntabilitas
4. Pertanggungjawaban
5. Kewajaran.”

Berikut penjelasan dari prinsip-prinsip diatas:

1. Transparasi

Transparasi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan suatu entitas. Ada beberapa indikator dari transparasi yaitu:

- a. Keterbukaan dalam menyampaikan kebijakan dan menyediakan informasi.
- b. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya.

2. Kemandirian

Suatu keadaan dimana suatu entitas dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Ada beberapa indikator dari kemandirian, yaitu:

- a. Menjaga kerahasiaan instansi.
- b. Pengambilan suatu keputusan profesional.
- c. Pengambilan suatu bebas dari konflik kepentingan.
- d. Pengambilan keputusan bersifat objektif atau bebas dari tekanan/pengaruh darimana pun.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagian suatu entitas sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif. Ada beberapa indikator dari akuntabilitas, yaitu:

- a. Kejelasan fungsi setiap bagian instansi dan pegawai.
- b. Kejelasan pelaksanaan setiap pelaksanaan instansi.
- c. Keefektivan sistem pengendalian internal.
- d. Kejelasan pertanggungjawaban setiap bagian instansi.
- e. Sistem penghargaan dan sanksi terhadap kinerja setiap bagian instansi.

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan suatu entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam prinsip-prinsip korporasi. Ada beberapa indikator dari pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab selalu berpegang pada etika dan pedoman perilaku.
- b. Setiap bagian instansi berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan anggaran dasar.

5. Kewajaran

Kewajaran yaitu keadilan atau kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa indikator dari kewajaran, yaitu:

- a. Memperlakukan semua orang yang berkepentingan secara wajar, adil, dan setara.
- b. Kebijakan kompensasi positif dan kompensasi negatif.

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan berbagai macam prinsip dari *Good Government Governance*. Menurut penulis, kelima prinsip utama *Good Government Governance* yang wajib dipahami untuk sektor publik adalah Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran. Walaupun selain kelima prinsip tersebut juga terdapat prinsip-prinsip *Good Government Governance* yang lain.

2.1.2 Pengendalian Internal Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal Pemerintah

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang memiliki fungsi melakukan penelitian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, audit, pelaporan, dan telaah sejawat.

Adapun definisi dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 2 ayat (3), yaitu:

“Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
2. Keandalan laporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

2.1.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan SPIP

Pencapaian tujuan dari suatu sistem tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi terutama faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Internal juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor keberhasilan tersebut.

Menurut Wibisono (2010) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yaitu:

1. “Sumber Daya Manusia
2. Komitmen
3. Keteladanan Pimpinan
4. Ketersediaan Infrastruktur.”

Berikut penjelasan beberapa faktor di atas, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber utama dan penggerak dalam suatu organisasi, dan merupakan *soft control* dalam penerapan SPIP. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah sumber daya manusia yang memiliki integritas dan menaati etika adalah merupakan komponen penting dalam mendorong agar organisasi dapat berjalan pada jalurnya.

2. Komitmen

Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, komitmen pimpinan sangat diharapkan sehingga apapun keputusan maupun kebijakan yang akan diambil terkait dengan perbaikan terhadap pengendalian internal prosedur, dan aturan yang akan dilaksanakan mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan.

3. Keteladanan Pimpinan

Lingkungan pekerjaan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan budaya kerja dalam suatu organisasi. Dalam suatu kondisi lingkungan yang kondusif, dengan pimpinan yang selalu memberikan contoh perilaku yang positif, selalu mendorong bawahannya untuk terbiasa bersikap terbuka, jujur, dan disiplin akan memudahkan organisasi dalam

pencapaian tujuannya. Keteladanan pimpinan dalam bersikap dan bertingkah laku akan dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, etika, dan disiplin.

4. Ketersediaan Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur mencakup antara lain pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegritas dengan unsur-unsur SPIP lainnya, sesuai dengan proses bisnis dan karakteristik suatu instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan SPIP. Keberadaan infrastruktur harus didukung oleh implementasi dan infrastruktur SPIP tersebut.

Berdasarkan paparan di atas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPIP terdiri dari sumber daya manusia yang memiliki integritas, adanya komitmen dari seluruh komponen organisasi, keteladanan pimpinan dan ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

2.1.2.4 Unsur-Unsur Pengendalian Internal Pemerintah

Dalam penerapan pengendalian internal pemerintah terdapat unsur-unsur yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan sistem pengendalian internal. Menurut Tunggal (2014:3), *Committee of Sponsoring Organizations of The Treatway Commission* (COSO) memperkenalkan adanya lima unsur pengendalian yang meliputi:

1. “Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Aktivitas Pengawasan.”

Menurut (Gondodiyoto 2007:281) menyebutkan ada empat domain dalam pengendalian intern, meliputi:

1. *“Planning and Organization* (Perencanaan dan Organisasi)
2. *Acquisition and Implementation* (Perolehan dan implementasi)
3. *Delivery and Support* (Penyerahan dan Pendukungan)
4. *Monitoring* (Pemantauan).”

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada unsur sistem pengendalian internal menurut COSO atau PP No. 60 Tahun 2008, karena pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal dalam Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Internal yang tidak dipraktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai negara yang diadopsi dari COSO. Penerapan unsur ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyatukan dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya.

Ada beberapa indikator dari lingkungan pengendalian, diantaranya:

- a. Komitmen nilai integritas dan nilai etika.
- b. Independensi dan fungsi pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal.
- c. Penetapan pengawasan dewan, struktur, pihak berwenang dalam mencapai tujuan dan jalur pelaporan.
- d. Komitmen menarik, mengembangkan, mempertahankan individu yang berkompeten.
- e. Memegang individu yang bertanggung jawab.

2. Penilaian Risiko

Dalam rangka penilaian risiko, Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ada beberapa indikator dari penilaian risiko, diantaranya:

- a. Menetapkan tujuan dalam identifikasi dan penilaian risiko.
- b. Identifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan.
- c. Menilai risiko potensi penipuan.
- d. Mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat mempengaruhi SPI.

3. Aktivitas Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuranm kompleksitas, dari sifat dan tugas

dan fungsi yang bersangkutan. Ada beberapa indikator dari aktivitas pengendalian, diantaranya:

- a. Memilih dan mengembangkan pengendalian atas mitigasi/usaha pencegahan risiko terhadap pencapaian tujuan.
- b. Pengembangan pengendalian atas teknologi terhadap pencapaian tujuan..
- c. Pengendalian melalui kebijakan yang diterapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Ada beberapa indikator dari informasi dan komunikasi, diantaranya:

- a. Menghasilkan dan menggunakan kualitas informasi relevan.
- b. Mengkomunikasikan informasi untuk mendukung pengendalian internal.
- c. Komunikasi dengan pihak eksternal.

5. Aktivitas Pengawasan

Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal sepanjang waktu. Ada beberapa indikator dari pemantauan, diantaranya:

- a. Memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan.
- b. Melakukan evaluasi dan komunikasi di waktu tertentu.

2.1.3 Pencegahan Kecurangan

2.1.3.1 Pengertian Pencegahan Kecurangan

Kasus *fraud* yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi suatu entitas. Apabila *fraud* tidak bisa dideteksi dan dihentikan, maka akan berakibat fatal bagi suatu entitas. Oleh karena itu, pimpinan suatu entitas harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Adapun definisi dari pencegahan kecurangan (*fraud*) menurut Karyono (2013:47) adalah sebagai berikut:

“Mencegah *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan (*fraud*).”

Kemudian definisi lain dari pencegahan kecurangan (*fraud*) menurut Fitrawansyah (2014:16) adalah sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan (*fraud*) bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu dibandingkan bila auditor internal berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* tersebut. Dan bila *fraud* sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini.”

Lalu definisi lain dari pencegahan kecurangan (*fraud*) menurut Amrizal (2004) adalah sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah suatu upaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut.”

Definisi selanjutnya dari pencegahan kecurangan (*fraud*) menurut Iqbal (2010) adalah sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan adalah suatu sistem dan prosedur yang bertujuan khusus dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, kalau bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi (dapat membuat jera) terjadinya *fraud*.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya, sistem dan prosedur reintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan, dan menghalangi terjadinya *fraud*.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Kecurangan

Kecurangan (*Fraud*) umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor pendorong *fraud* boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan kesempatan/peluang untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan.

Menurut Kumaat (2011:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

1. “Desain pengendalian internal kurang tepat, sehingga meninggalkan celah risiko.
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku.
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi proses bisnis.”
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap proses bisnis yang berlaku.”

Sedangkan menurut Hery (2016:200), ada tiga kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, antara lain:

1. “Insentif atau tekanan, manajemen maupun karyawan memiliki insentif, dorongan, atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. Peluang, keadaan yang memberi peluang atau kesempatan bagi manajemen maupun karyawan untuk melakukan kecurangan.
3. Perilaku atau pembenaran atas tindakan, suatu perilaku atau karakter yang membuat manajemen maupun karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, atau lingkungan yang membuat mereka bertindak tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur tersebut.”

2.1.3.3 Klasifikasi Kecurangan

Arens (2008:338) mengklasifikasi kecurangan (*fraud*) kedalam dua kelompok utama, yaitu:

1. “Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*)
2. Penyalahgunaan Aset (*Missappropriation of Assets*).”

Berikut uraian teori diatas sebagai berikut:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*)

Merupakan salah saji sebuah laporan keuangan yang tidak sesuai dengan semestinya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Tindakan ini seperti manipulasi, representasi yang salah atau hilang, dan penerapan salah prinsip akuntansi yang disengaja.

2. Penyalahgunaan Aset (*Missappropriation of Assets*)

Merupakan salah saji yang timbul dari pencurian aset entitas untuk mengambil keuntungan didalamnya.

2.1.3.4 Tujuan Pencegahan Kecurangan

Menurut (Pusdiklatwas BPKP, 2008:38) pencegahan *fraud* yang efektif memiliki 5 (lima) tujuan yaitu:

1. *Prevention*, yaitu mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi.
2. *Deterrence*, yaitu menangkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba.
3. *Disruption*, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin.
4. *Identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
5. *Civil Action Prosecution*, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan *fraud* kepada pelakunya.”

2.1.3.5 Metode Pencegahan Kecurangan

Fraud merupakan masalah yang ada di dalam lingkungan suatu entitas, dan harus dicegah sedini mungkin. Metode pencegahan *fraud* yang efektif menurut Tunggal (2012:33), yaitu:

1. “Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu.
2. Proses rekrumen yang jujur
3. Pelatihan *fraud awareness*
4. Lingkungan kerja yang positif
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati
6. Program bantuan kepada pegawai yang kesulitan
7. Tanamkan kesan bahwa tindakan *fraud* dapat di sanksi dengan tegas sesuai dengan pelanggaran.”

Adapun penjelasan dari tata kelola pencegahan fraud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu

Riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud*, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut suatu entitas. Nilai-nilai semacam itu menciptakan budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu antar sesama anggota organisasi atau entitas.

2. Proses rekrumen yang jujur

Upaya membangun lingkungan pengendalian yang positif, penerimaan pegawai merupakan awal dari masuknya orang-orang yang terpilih melalui seleksi yang ketat dan efektif untuk mengurangi kemungkinan memperkerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat

kejujurannya rendah. Hanya orang-orang yang dapat memenuhi syarat tertentu yang dapat diterima. Kebijakan semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dapat pertimbangan akan dipekerjakan, serta referensi pribadi calon pegawai, termasuk referensi pribadi calon pegawai, termasuk referensi tentang karakter dan integritas. Pelatihan secara rutin untuk seluruh pegawai nilai-nilai perusahaan dan aturan perilaku, dalam interview kinerja regular termasuk diantaranya evaluasi kontribusi pegawai/individu dalam mengembangkan lingkungan kerja yang positif sesuai dengan nilai-nilai suatu entitas, dan selalu melakukan evaluasi obyektif atas kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan dan standar perilaku dalam setiap pelanggaran ditangani segera.

3. Pelatihan *fraud awareness*

Pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu. Keahlian yang diberikan dalam organisasi untuk pelatihan keterampilan dan pengembangan karir pegawai, termasuk semua tingkatan pegawai dan sumber daya internal . Pelatihan tersebut bermaksud untuk membantu meningkatkan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar tidak terjadi banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

4. Lingkungan kerja yang positif

Beberapa riset yang telah dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila pegawai mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan.

Cara menjadikan lingkungan kerja positif diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan penghargaan sesuai dengan sasaran dan hasil kinerja
- b. Kesempatakan yang sama bagi semua pegawai
- c. Program kompensasi secara profesional
- d. Pelatihan secara profesional

5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati

Kode etik pada umumnya selalu sejalan dengan moral manusia dan merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Membangun budaya jujur, keterbukaan dan memberikan program bantuan tidak dapat diciptakan tanpa memberlakukan aturan perilaku dalam kode etik di lingkungan pegawai. Harus dibuat kriteria apa saja yang dimaksud dengan perilaku jujur dan tidak jujur, perbuatan yang tidak boleh dan yang tidak diperbolehkan. Semua ketentuan tertulis dan disosialisasikan ke seluruh karyawan dan harus mereka setuju dengan membubuhkan tanda tangannya.

6. Program bantuan kepada pegawai yang kesulitan

Masalah ataupun kesulitan akan dialami oleh setiap pegawai atau karyawan pada setiap perusahaan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan berbagai macam kecurangan guna keluar dari masalah yang dihadapinya dalam masalah keuangan akibat desakan ekonomi yang ada, penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Instansi memberikan sebuah perhatian guna untuk mencegah kecurangan ini terjadi diantaranya sebagai berikut:

- a. Dukungan dengan cara memberikan bantuan dapat di berikan kepada pegawai guna mencegah adanya kecurangan serta penyelewengan terhadap keuangan perusahaan dan desakan ekonomi yang dimiliki para pegawai sehingga dapat meminimalisir kerugian perusahaan terhadap kecurangan.
- b. Memberikan solusi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya.

7. Tanamkan kesan bahwa tindakan *fraud* dapat di sanksi dengan tegas sesuai dengan pelanggaran

Strategi pencegahan kecurangan yang terkahir yaitu dengan menanamkan kesan bahwa setiap pelakuan tindakan kecurangan dan mendapatkan sanksi. Pihak suatu entitas khususnya pihak pimpinan entitas harus benar-benar menanamkan sanksi, maksudnya membuat dan menjalankan sesuatu

peraturan terhadap tindakan kecurangan yang ada sehingga, perbuatan menyimpang dalam suatu entitas dapat diminimalisir, dan memberikan efek jera terhadap oknum yang akan ataupun yang sudah melakukan tindakan curang. Pencegahan kecurangan lebih baik dari pada mengatasi kecurangan, oleh karena itu perlu kerjasama yang baik bersama-sama pada setiap anggota organisasi guna mensejahterahkan suatu entitas, karena apabila suatu entitas dapat berkembang dan maju kearah lebih baik, maka sejahtera pula seluruh pegawai yang ada dalam suatu entitas. Serta apabila seluruh bagian pegawai dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin, maka dapat dilatih pula moral, etika, serta teladan yang baik pada jiwa setiap pegawai.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai pengaruh pelaksanaan *good government governance* dan pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan kecurangan, yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Karlina Gita Oktavia (2015)	Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi pada SKPD Kota Bukittinggi).	Variabel Terikat: Tingkat Kecurangan (Pencegahan). Variabel Bebas: Tata Kelola Pemerintahan dan Efektivitas Pengendalian Internal.	Variabel Bebas: Peran Auditor Internal. Sektor yang diteliti: Studi pada SKPD Kota Bukittinggi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peran auditor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kecurangan, sedangkan variabel tata kelola pemerintahan dan efektivitas pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kecurangan.
2	Muqti Randy Syarif (2016)	Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal Pemerintah, Peran Auditor Internal, dan Keadilan sosial Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi pada SKPD	Variabel Terikat: Tingkat Kecurangan (Pencegahan) Variabel Bebas: Tata Kelola Pemerintahan dan	Variabel Bebas: Peran Auditor Internal dan Keadilan Sosial. Sektor yang diteliti: Studi pada SKPD Kabupaten Rokan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian internal pemerintah, peran auditor internal, dan keadilan sosial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kecurangan.

		Kabupaten Rokan Hulu).	Efektivitas Pengendalian Internal Pemerintah.	Hulu.	
3	Rizke Wiliyanti (2014)	Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal Pemerintah, dan Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi).	<p>Variabel Terikat: Tingkat Kecurangan (Pencegahan).</p> <p>Variabel Bebas: Tata Kelola Pemerintahan dan Efektivitas Pengendalian Internal Pemerintah.</p>	<p>Variabel Bebas: Peran Auditor Internal.</p> <p>Sektor yang diteliti: Studi pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tata kelola pemerintahan (TKP) tidak signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa tata kelola pemerintahan tidak berpengaruh terhadap tingkat kecurangan. Sedangkan variabel efektivitas pengendalian internal (EPI), signifikan pada level 5%, artinya efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap tingkat kecurangan. Selanjutnya adalah peran auditor internal (PAI) yang juga signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh politik berpengaruh terhadap tingkat kecurangan.

4	Gusnardi (2009)	Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan	Variabel Terikat: Pencegahan Kecurangan. Variabel Bebas: Tata Kelola Pemerintahan/Perusahaan dan Pengendalian Internal.	Variabel Bebas: Peran Komite Audit dan Audit Internal. Sektor yang diteliti: Studi Empiris pada BUMN Tbk di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite audit, pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
5	Rio Sempana Karo Karo (2015)	Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Bandung).	Variabel Terikat: Pencegahan Kecurangan. Variabel Bebas: Pengendalian Internal.	Variabel Bebas: Audit Internal. Sektor yang diteliti: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Bandung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel audit internal dan pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
6	Rusman Soleman (2013)	Pengaruh Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Maluku Utara).	Variabel Terikat: Pencegahan Kecurangan. Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i> dan Pengendalian Internal.	Sektor yang diteliti: Studi Empiris pada SKPD Provinsi Maluku Utara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
7	Ida Bagus Dwika Maliawan, Edy Sujana, dan I Putu Gede Diatmika (2017)	Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Studi Empiris pada Bank Mandiri Kantor Cabang Area	Variabel Terikat: Pencegahan Kecurangan. Variabel Bebas: Efektivitas	Variabel Bebas: Audit Internal. Sektor yang diteliti: Studi Empiris pada Bank Mandiri Kantor Cabang Area	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel audit internal dan efektivitas pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dan secara simultan kedua variabel

		Denpasar).	Pengendalian Internal.	Denpasar.	tersebut berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>).
8	Taufeni Taufik (2010)	Pengaruh Internal Auditor, Eksternal Auditor, dan DPRD Terhadap Pencegahan Kecurangan (Sensus pada Kota/Kabupaten di Provinsi Riau).	Variabel Terikat: Pencegahan Kecurangan.	Variabel Bebas: Internal Auditor, Eksternal Auditor dan DPRD. Sektor yang diteliti: Sensus pada Kota/Kabupaten di Provinsi Riau.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel internal auditor, eksternal auditor, dan dprd berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
9	Hermiyetti (2009)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang.	Variabel Terikat: Pencegahan Kecurangan (Pengadaan Barang). Variabel Bebas: Pengendalian Internal.	Sektor yang diteliti: Studi pada Rumah Sakit Umum dan Swasta di Bandung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang
10	Fitriatil Husna (2013)	Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal kas dan implementasi <i>good corporate governance</i> terhadap kecurangan	Variabel Terikat: Pencegahan Kecurangan. Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i> .	Variabel Bebas: Penerapan sistem pengendalian internal kas. Sektor yang diteliti: Studi Empiris pada Perusahaan BUMN di Kota Padang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan sistem pengendalian internal kas dan implementasi <i>good corporate governance</i> berpengaruh secara simultan terhadap kecurangan.

11	Eka Ariaty Arfa (2011)	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan.	Variabel Terikat: Pencegahan <i>Fraud</i> (Pengadaan Barang). Variabel Bebas: Pengendalian Internal.	Variabel Terikat: Implikasi Pada Kinerja Keuangan. Sektor yang diteliti: Studi pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi serta pemantauan secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang.
12	Anggit Purwitasari (2013)	Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang (Survey pada 5 Rumah Sakit di Bandung).	Variabel Terikat: Pencegahan <i>Fraud</i> (Pengadaan Barang). Variabel Bebas: Pengendalian Internal.	Variabel Bebas: Komitmen Organisasi. Sektor yang diteliti: Survey pada 5 Rumah Sakit di Bandung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang.
13	Go Rizal Gozali (2012)	Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Perilaku <i>Fraud</i> Pada Lembaga Perbankan Nasional (Studi Empiris pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk)	Variabel Terikat: Pencegahan <i>Fraud</i> Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Studi Empiris pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> terhadap perilaku <i>fraud</i> .

14	Lisa Amelia Herman (2013)	Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang).	Variabel Terikat: Kecurangan Variabel Bebas: Sistem Pengendalian Internal	Variabel Bebas: Keadilan Organisasi Sektor yang diteliti: Studi Empiris pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada kantor cabang utama bank pemerintah di Kota Padang.
15	Tiara Delfi (2014)	Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Survey pada Perusahaan BUMN Cabang Pekanbaru).	Variabel Terikat: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Variabel Bebas: Efektivitas Pengendalian Internal	Variabel Bebas: Kesesuaian Kompensasi Sektor yang diteliti: Survey pada Perusahaan BUMN Cabang Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
16	Sitti Firatul Jannah (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya).	Variabel Terikat: Pencegahan <i>Fraud</i> Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Studi pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> di Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya.
17	Ahmad Faisol Ansori (2017)	Pengaruh Implementasi <i>Good University Governance</i> , Keefektifan	Variabel Terikat: Kecenderungan	Variabel Bebas: Implementasi <i>Good University Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh

		Sistem Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan <i>Fraud</i> Pada PTKIN-BLU	<i>Fraud</i> Variabel Bebas: Keefektifan Sistem Pengendalian Internal	dan Ketaatan Aturan Akuntansi Sektor yang diteliti: PTKIN-BLU	negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin efektif sistem pengendalian internal suatu organisasi maka semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi.
18	Ni Komang Linda Lestari dan Ni Luh Supadmi (2017)	Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, dan Asimetri Informasi Pada Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung).	Variabel Terikat: Kecurangan Akuntansi Variabel Bebas: Pengendalian Internal	Variabel Bebas: Integritas dan Asimetri Informasi Sektor yang diteliti: Studi pada SKPD di Kabupaten Klungkung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian Internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Adanya pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus dalam instansi dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi.
19	Rizki Zainal (2013)	Pengaruh Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah dan Swasta di Kota Padang).	Variabel Terikat: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel Bebas: Pengendalian Internal	Variabel Bebas: Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi Sektor yang diteliti: Studi Empiris pada Kantor Cabang Bank Pemerintah dan Swasta di Kota Padang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan akuntansi pada kantor cabang bank pemerintah dan swasta di kota Padang.
20	Tia Radhiah (2016)	Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Individu	Variabel Terikat: Kecenderungan Kecurangan	Variabel Bebas: Kesesuaian Kompetensi dan Moralitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas pengendalian internal berpengaruh terhadap

		Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia KCU Kota Pekanbaru).	Akuntansi Variabel Bebas: Efektivitas Pengendalian Internal	Sektor yang diteliti: Studi Kasus pada PT Pos Indonesia KCU Kota Pekanbaru	kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi tingkat efektifitas pengendalian internal, maka semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi.
21	Susi Hendriani & Farid Firman (2013)	Pengaruh Pendidikan dan Latihan serta Kompetensi terhadap Implementasi SPIP guna Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi pada Auditor BPKP Jawa Tengah).	Variabel Terikat: Pencegahan <i>Fraud</i> Variabel Bebas: Implementasi SPIP	Variabel Bebas: Pendidikan dan Latihan serta Kompetensi Sektor yang diteliti: Studi pada Auditor BPKP Jawa Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
22	Chairun Nisak dkk (2013)	Sistem Pengendalian Intern dalam Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi pada SKPD Kabupaten Bangkalan).	Variabel Terikat: Pencegahan <i>Fraud</i> Variabel Bebas: Sistem Pengendalian Internal	Sektor yang diteliti: Studi pada SKPD Kabupaten Bangkalan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian merupakan alur yang menggambarkan proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Tujuan utama dari kerangka penelitian adalah memberikan arah dan fokus penelitian secara efektif yang didasarkan pada hasil kajian teoritik dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Manfaat utama dari kerangka penelitian yang jelas adalah peneliti dapat dengan jelas membangun hipotesis-hipotesis penelitian yang akan diuji.

Landasan teori untuk penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis suatu entitas yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Oleh karena itu, teori ini telah digunakan oleh berbagai peneliti di bidang akuntansi, ekonomi, keuangan, pemasaran, ilmu politik, perilaku organisasi, dan sosiologi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer.

Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan hubungan keagenan sebagai berikut:

“We define an agenvy relationship as a contract inder which one or more persons (the principal’s) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority.”

Teori keagenan sering juga dihubungkan dengan masalah kecurangan akuntansi. Hal ini dikarenakan agen dan prinsipal memiliki kepentingan sendiri-sendiri dimana keduanya ingin memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Karena hal inilah yang menyebabkan tidak sejalannya keinginan antara agen dan prinsipal, yang mengakibatkan kemungkinan agen akan bertindak yang berdampak pada kerugian bagi prinsipal demi memenuhi keinginannya. Tindakan yang dilakukan agen dalam hal ini bisa mengarah pada kecurangan (*fraud*).

Jensen dan Meckling menjelaskan juga bahwa prinsipal dapat memecahkan permasalahan ini dengan memberikan pelaksanaan *good government governance*) yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya monitoring, sedangkan untuk hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal (SPIP) organisasi yang efektif. Cara untuk mengatasi permasalahan keagenan seharusnya pimpinan suatu entitas melaksanakan kegiatan suatu entitas dengan benar karena masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi. Permasalahan keagenan juga terjadi, apabila prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Oleh karena itu, studi ini berteori bahwa tingkat pencegahan kecurangan dalam organisasi sektor publik atau pemerintahan bergantung pada variabel kontigensi dari pelaksanaan *good government governance* dan pengendalian internal pemerintah.

2.2.1 Pengaruh Pelaksanaan *Good Government Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan

Adanya penerapan *Good Government Governance* (GGG) membuat sejumlah organisasi mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan kecurangan (*fraud*). Salah satu cara tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada audit internal untuk mencegah *fraud* yang mungkin terjadi dalam lingkungan organisasi.

Apabila teknik pencegahan kecurangan berjalan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi suatu entitas karena akan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, prinsip *good government governance* bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas, dan ada media kontrol masyarakat.

Terdapat teori yang menghubungkan antara pengaruh *good government governance* terhadap tingkat pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

Tunggal (2013:34), mengemukakan bahwa:

“Terdapat beberapa tata kelola pemerintahan atau *good government governance* untuk mencegah kecurangan (*fraud*) diantaranya menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab pimpinan untuk mengevaluasi pencegahan kecurangan (*fraud*) dan pengawasan oleh komite audit.”

Sedangkan menurut Karyono (2013:69), menyebutkan bahwa:

“Berbagai prinsip *good government governance* bila diterapkan akan dapat mencegah kecurangan (*fraud*) karena prinsipnya bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan

hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tindak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas dan ada media kontrol masyarakat.”

Menurut Fitrawansyah (2014:15) mencegah dan mendeteksi kecurangan adalah sebagai berikut:

“Dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan (*fraud*) sebenarnya ada beberapa pihak yang terkait yaitu *good government governance* dan *Transaction level control process*. *Good Government Governance* dilakukan oleh pimpinan yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*.”

Berdasarkan pengertian teori diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Government Governance* digunakan dalam rangka mencegah potensi kecurangan yang terjadi pada perusahaan maupun organisasi sektor publik. Secara prinsip GGG adalah bentuk kode etik dan prinsip-prinsip lain yang digunakan untuk mencegah organisasi dari kejahatan yang bertentangan dengan hukum.

Teori diatas didukung juga oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Soleman (2013) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan mengeliminasi faktor-faktor pendorong terjadinya kecurangan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran, integritas, dan partisipasi.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi (2009) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap

Pencegahan Kecurangan, artinya Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gozali (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap perilaku *fraud*. Begitu pula dengan jannah (2016) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarif (2016) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kecurangan. Ini artinya apabila suatu pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* maka dapat dikatakan tindakan kecurangan akan berkurang.

Sementara itu, Oktavia (2015) menyatakan bahwa variabel Tata Kelola Pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kecurangan. Berikutnya juga penelitian dari Wiliyanti (2014) menyatakan bahwa variabel Tata Kelola Pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, juga dari definisi yang telah ada, maka sampai pada pemahaman penulis bahwa Pelaksanaan *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

2.2.2 Pengaruh Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan

Pengendalian internal mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan. Pengendalian internal merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas untuk memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan. Adanya pengendalian intern seperti ini maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain, hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dan mengalokasikan kesalahan. Manajemen merancang struktur pengendalian internal yang memadai agar dapat mencapai tujuan.

Terdapat teori yang menghubungkan antara efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

Tuanakotta (2007:162) mengemukakan bahwa:

“Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian Internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar pagar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraud* yang cerdas dan mempunyai nyali untuk melakukannya.”

Menurut Karyono (2013:47) pencegahan kecurangan adalah:

”Pencegahan kecurangan (*fraud*) yang utama ialah dengan menetapkan sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas organisasi. Pengendalian internal itu agar dapat efektif mencegah (*fraud*) harus andal dalam rancangan struktur pengendaliannya dan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Pengendalian internal tidak dapat secara efektif mencegah kecurangan (*fraud*) karena ada berbagai keterbatasan antara lain berupa kolusi dan pengabaian oleh manajemen.”

Berdasarkan teori penghubung diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dan dengan adanya pengendalian internal yang baik, terjadinya kecurangan (*fraud*) dan pemborosan dapat dideteksi atau ditanggulangi secara dini sehingga kerugian suatu entitas dapat dihindari.

Teori-teori diatas juga didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Hermiyetti (2009) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan, artinya pengendalian internal dapat digunakan untuk menjaga keamanan harta milik suatu entitas dan memberikan keyakinan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada pimpinan adalah benar.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Karo (2015) yang menyatakan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung, artinya semakin baik pengendalian internal maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan.

Kemudian peneliti yang dilakukan oleh Husna (2013) yang menyatakan bahwa Pengendalian Internal mempunyai pengaruh dalam upaya Pencegahan Kecurangan, artinya pengendalian internal merupakan serangkaian kegiatan suatu entitas untuk memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan suatu entitas.

Lalu peneliti yang dilakukan oleh Taufik (2010) menyatakan bahwa Internal Auditor berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Selanjutnya, penelitian

dari Maliawan, Sujana, Diatmika (2017) menyatakan bahwa variabel efektivitas pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecuranga (*fraud*). Hal ini berarti sistem pengendalian intern yang terdapat didalam suatu perusahaan, semakin efektif sistem pengendalian yang diterapkan dalam suatu entitas, maka semakin rendah kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi.

Berikutnya penelitian dari Soleman (2013) menyatakan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan pencegahan kecurangan dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan, dan perbaikan moral individu pada setiap level dalam organisasi.

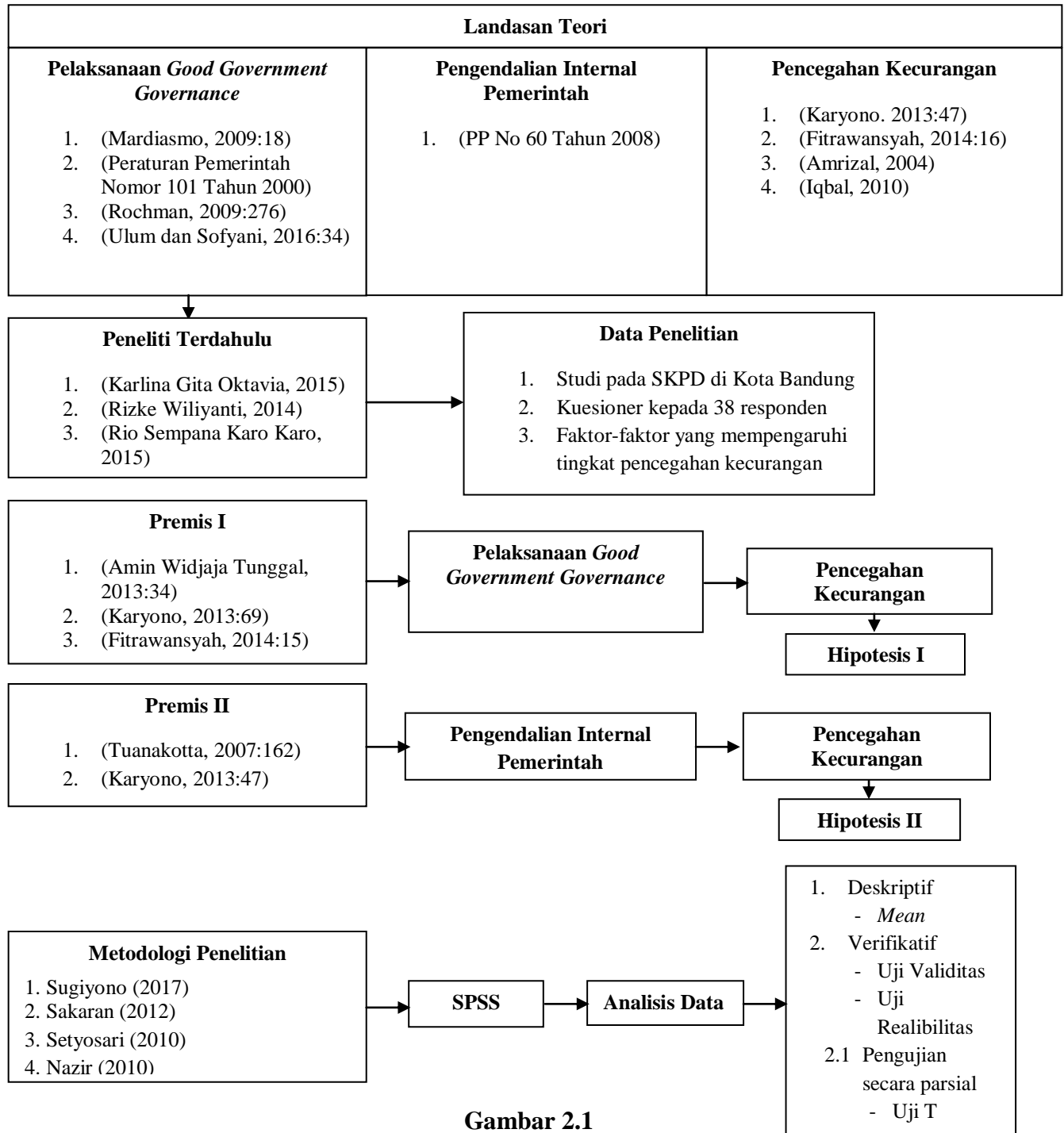
Begitu juga dengan Nisak (2013) dan Arfa (2011) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Selanjutnya juga dari Radhiah (2016) dan Zainal (2013) yang menyimpulkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Namun berbanding terbalik dari hasil penelitian dari Oktavia (2015) menyatakan bahwa variabel efektivitas pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kecurangan. Serta penelitian dari Syarif (2016) menyatakan bahwa variabel efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kecurangan.

Senada dengan peneliti yang dilakukan oleh Delfi (2014) menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berikutnya juga penelitian yang dilakukan oleh Herman (2013) juga menyatakan kalau sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan.

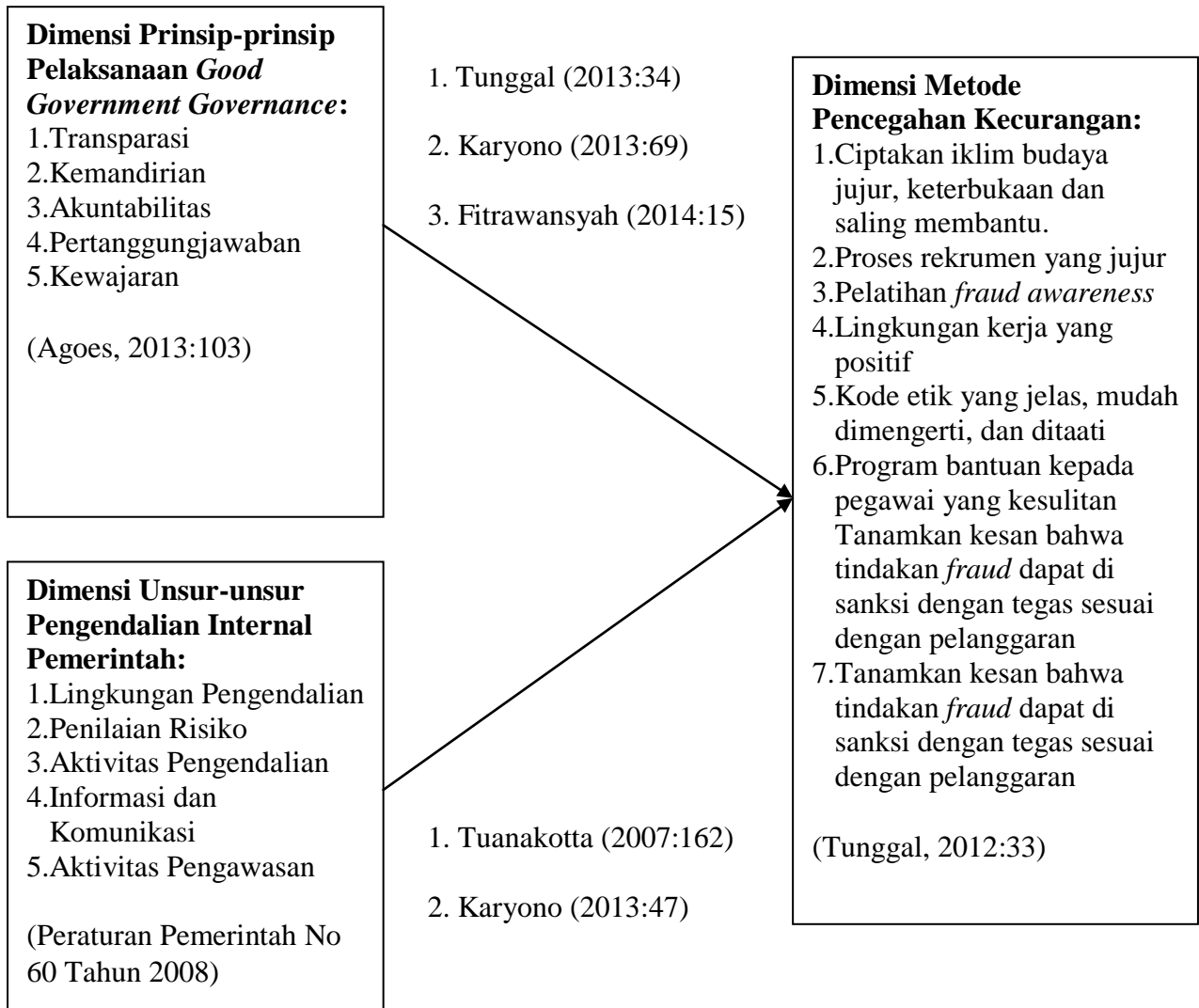
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, juga dari definisi yang telah ada maka sampai pada pemahaman penulis bahwa Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:93) Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk kalimat pernyataan. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi). Berdasarkan uraian diatas peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Pelaksanaan *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan.
- H₂ : Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan.